

## **ABSTRAK**

### **PERANAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI ARAB SAUDI DALAM MELINDUNGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG TERLANTAR DI JEDDAH**

**Oleh**

**MOHAMMAD DEDY**

Pemerintah Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam melindungi warga Negeranya, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Perwakilan Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di luar negeri, dalam hal ini yang mempunyai tugas ialah Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI). Salah satu masalah yang sedang dihadapi oleh KJRI Jeddah, Arab Saudi ialah terlantarnya ribuan WNI di kolong jembatan Kandarrah, Jeddah, Arab Saudi. Setiap tahun jumlah WNI yang terlantar mencapai 24.000 jiwa, dan pada tahun ini masih ada ribuan WNI yang belum dipulangkan ke Indonesia. Alasan-alasan WNI yang terlantar di bawah jembatan tersebut bermacam-macam seperti melakukan “umroh sandal jepit” yang artinya melakukan ibadah umroh ke Arab Saudi tetapi tidak memiliki tiket pulang, mereka ingin memiliki pekerjaan di Arab Saudi, kemudian juga menunggu musim haji tiba, dan alasan lain ialah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang kabur dari majikannya.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peranan perwakilan pemerintah Indonesia di Arab Saudi dalam melindungi warga Negara Indonesia di Jeddah dan upaya-upaya konkrit apa saja yang dilakukan oleh perwakilan pemerintah Indonesia di Arab Saudi dalam mengatasi WNI yang terlantar di Jeddah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan dilakukan melalui pendekatan yuridis, pendekatan lapangan dengan menggunakan data primer dan sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka serta melalui wawancara bebas.

*Mohammad Dedy*

Upaya-upaya konkrit yang telah dan sedang dilakukan KJRI dalam menangani kasus WNI yang terlantar di Jeddah ialah mengidentifikasi WNI yang bermukim di kolong jembatan tersebut, apabila WNI terbukti tidak memiliki pelanggaran atau pidana berat, mereka dimasukkan ke rumah penampungan imigrasi atau biasa disebut “Rumah Tarhil”. Selanjutnya mereka menunggu *exit permit* atau izin keluar dari pemerintah Arab Saudi. Jika izin keluar telah diterbitkan, WNI tersebut bisa dipulangkan. Pada saat penulisan skripsi ini, proses

penanganan tersebut sedang berlangsung tetapi berjalan lambat karena selain jumlah WNI sangat banyak dan membutuhkan biaya yang sangat besar, juga harus ada koordinasi yang baik antara KJRI dengan Pemerintah Arab Saudi serta WNI yang terlantar itu sendiri.

Menurut penulis, Pemerintah harus melakukan suatu tindakan yang tegas dalam memberikan hukuman bagi WNI yang telah melakukan pelanggaran hukum dan keimigrasian. Demikian pula pejabat terkait maupun perusahaan jasa yang memberangkatkan WNI ke luar negeri secara illegal harus dibuatkan aturan hukum agar mereka dapat diberikan sanksi yang tegas.

Kata kunci : WNI terlantar, Perwakilan Konsuler, KJRI Jeddah